

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014 – 2018 beserta target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya yang dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dibiayai oleh APBN/BLN, APBD I dan APBD II, dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan anggaran yang cukup berarti untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut . Pada tahun 2014, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

- Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
- Kegiatan pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - Kegiatan pembangunan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan mobil jabatan
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan pembuatan dan penataan arsip
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari :
 - Kegiatan pengadaan mesin/kartu absen
 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
 - Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - Kegiatan pengadaan pakaian olah raga
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
 - Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - Kegiatan peningkatan manajemen aset / barang daerah
 - Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan, terdiri dari :
 - Kegiatan pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani
- j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pilihan dimana penilaian akan Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada pencapaian kinerja program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan berdasarkan evaluasi rencana kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
(1)	(2)	(3)
1. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan		
1.1. Intensifikasi Komoditi	Luasan intensifikasi kebun sawit	3.000 Ha
	Luasan intensifikasi kebun karet	2.750 Ha
	Luasan intensifikasi kebun kakao	1.375 Ha
	Luasan intensifikasi kebun kelapa	1.250 Ha
	Luasan intensifikasi kebun lada	1.000 Ha
1.2. Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Terehabilitasinya tanaman lada	1.000 Ha
1.3. Peremajaan Komoditi Perkebunan	Teremajakannya kebun karet	2.000 Ha
	Teremajakannya kebun kakao	1.000 Ha
	Teremajakannya kebun lada	500 Ha
1.4. Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah Ha pertahun	27 Ha
1.5. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi	Jumlah Petani berkelompok tani yang dilatih	300 Petani
2. Program Perluasan Kebun Sawit		
2.1. Ekstensifikasi perkebunan sawit	Terbangunnya kebun kelapa sawit	5.000 Ha
3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Non Sawit		
3.1. Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan	Terbangunnya kebun karet	2.000 Ha
	Terbangunnya kebun kakao	500 Ha

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
(1)	(2)	(3)
	Terbangunnya kebun kelapa dalam	250 Ha
	Terbangunnya kebun lada	250 Ha
3.2. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan	Jumlah benih beredar dan sertifikat pertahun	24.948.000 benih
3.3. Penyediaan sarana produksi perkebunan	Jumlah unit pertahun	9.350 Unit
4. Program Rehabilitasi Reklamasi Lahan Perkebunan Pasca Tambang		
4.1. Ekstensifikasi kelapa sawit, karet dan kemiri	Jumlah Hektar/Tahun	2.400 Ha
5. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan		
5.1. Penyusunan database produksi perkebunan	Jumlah dokumen perencanaan pertahun	5 Dokumen
5.2. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pertahun	4 Laporan
6. Program Penanganan Konflik, Kebakaran Kebun dan Perubahan Iklim		
6.1. Pembinaan dan pengawalan konflik usaha perkebunan	Menurunnya jumlah konflik usaha perkebunan	60 Kasus
6.2. Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Jumlah kegiatan pertahun	15 Kegiatan
6.3. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan	Jumlah perusahaan pertahun	100 Perusahaan
7. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan		
7.1. Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok usaha pertahun	240 Klp. Usaha
7.2. Peningkatan jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi	Jumlah kelompok usaha pertahun	16 Klp. Usaha
7.3. Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen	Jumlah alsinbun unit pertahun	16 Unit
8. Program Pengembangan Produk-Produk Unggulan Daerah		
8.1. Pembinaan pengolahan bubuk lada	Jumlah kelompok tani/tahun	20 Klp
8.2. Pembinaan pengolahan gula semut	Jumlah kelompok tani/tahun	20 Klp
8.3. Pembinaan pengolahan nata de coco	Jumlah kelompok tani/tahun	20 Klp
9. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan		
9.1. Pembinaan pengolahan lump menjadi bahan olahan karet (bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa	Terbinanya pengolahan komoditi rakyat terhadap 4 kelompok karet, 4 kelompok kakao dan 2 kelompok lada	10 Kelompok
9.2. Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan	Jumlah unit pertahun	60 Unit
9.3. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Jumlah unit perhektar pertahun	
10. Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan		
10.1. Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya	Jumlah kelompok tani pertahun	87 Kel. Tani
10.2. Fasilitasi pemanfaatan alat pengolahan hasil	Jumlah kelompok tani pertahun	8 Kel. Tani
10.3. Fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan komoditi perkebunan	Jumlah kelompok tani pertahun	8 Kel. Tani

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
(1)	(2)	(3)
11. Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani		
11.1. Fasilitasi terbentuknya kelompok tani di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Jumlah kelompok pergapoktan pertahun	25 Kel. Tani
11.2. Fasilitasi pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Jumlah petugas pertahun	25 Petugas
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan		
12.1. Fasilitasi penguatan kelembagaan petani berdasarkan sistem kebersamaan ekonomi (SKE)	Terlatihnya jumlah kelompok pertahun	10 Kelompok
12.2. Fasilitasi pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Jumlah koperasi pertahun	16 Koperasi
12.3. Fasilitasi terbentuknya koperasi primer perkebunan	Jumlah koperasi primer pertahun	20 Koperasi
12.4. Fasilitasi terbentuknya asosiasi petani pekebun	Jumlah asosiasi pertahun	25 Asosiasi
12.5. Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun	Jumlah asosiasi pertahun	5 Asosiasi
12.6. Fasilitasi terbentuknya kemitraan antara petani produsen dengan perusahaan mitra	Jumlah kemitraan pertahun	20 Kemitraan
13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan		
13.1. Promosi atas hasil produksi perkebunan	Jumlah event pertahun	33 event
13.2. Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Jumlah unit pertahun	4 Unit
13.3. Penelitian (uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan	Jumlah kegiatan pertahun	8 Kegiatan
13.4. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Jumlah informasi pertahun	5 Informasi
13.5. Fasilitasi terbentuknya unit pengolahan dan pemasaran bersama (UPPB) karet	Jumlah unit pertahun	17 Unit
14. Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan		
14.1. Penyediaan sarana prasarana penunjang petugas teknis fungsional	Jumlah unit pertahun	22 Unit
14.2. Pelatihan/magang pada instansi terkait	Jumlah petugas pertahun	6 Petugas
15. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan		
15.1. Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	Jumlah hektar pertahun	10.000 Ha
15.2. Fasilitasi biomassa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya identifikasi dan sosialisasi POME	55 PKS
15.3. Fasilitasi integrasi sawit sapi	Jumlah kelompok tani pertahun	16 Kelompok
15.4. Fasilitasi dukungan dan penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Jumlah kegiatan / yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan	70 PBS

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
(1)	(2)	(3)
15.5. Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap usaha dagang/perusahaan	50 Usaha
15.6. Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Jumlah kelompok tani pertahun	28 Kelompok
16. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan		
16.1. Pelatihan SL-Pemandu lapangan	Jumlah pemandu pertahun	30 Orang
16.2. Pelatihan petani SL-PHT	Jumlah petani orang pertahun	2.350 orang
16.3. Pemantauan dan peramalan OPT perkebunan	Jumlah Kab/Kota pertahun	10 Kab/Kota
16.4. Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	Serangan OPT hektar pertahun	240 Ha
16.5. Pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH)	Ton pertahun	22.510 Ton
16.6. Uji terap aplikasi agens pengendali hayati dan pestisida nabati	Jumlah kelompok tani pertahun	28 Kelompok
16.7. Fasilitasi brigade proteksi perkebunan	Jumlah volume/unit/regu/tahun	28 Unit

Selain itu, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Agenda II yaitu Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat yang bertujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Ekonomi Yang Handal Berbasis Agribisnis dan Ekowisata dengan sasaran terwujudnya lahan perkebunan terdiri dari 1.000.000 ha kelapa sawit, 250.000 komoditas kelapa dalam, karet, kakao, lada dan aneka tanaman perkebunan serta meningkatnya produksi komoditas perkebunan sebesar 4.685.454 ton yang didominasi oleh Kelapa Sawit sebesar 4.500.000 ton. Adapun capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 7 Capaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sub Sektor Perkebunan

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2014		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan	1. Produksi Perkebunan (ton)				
	- Kelapa Sawit	Ton	6,975,000	8,064,000	115,62
	- Aneka Komoditi Lainnya	Ton	71,941	76,062	105,73
	2. Peningkatan perluasan areal perkebunan				
	- Kelapa Sawit	Ha	1,000,000	1,120,000	112
	- Aneka Komoditi Lainnya	Ha	136,109	139,656	102.60

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian untuk Produksi Perkebunan pada tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) pada tahun 2013 sebesar 6,975,000 ton, sedangkan tahun 2014 produksi kelapa sawit naik menjadi 8,064,000 ton atau mengalami kenaikan produksi sebesar 1,089,000 (115,62 %) dari tahun 2013. Faktor penyebab meningkatnya rata-rata produksi per tahun kelapa sawit adalah adanya pertambahan pengembangan perluasan areal yang mengakibatkan meningkatnya indeks pertambahan produksi terutama pada perluasan lahan yang memasuki tahapan Tanaman Menghasilkan (TM) sebanding dengan pertumbuhan perluasan areal tersebut.

Sedangkan Produksi aneka komoditi lainnya (Karet, Kelapa, Lada, Kakao, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete dan Cengkeh) pada tahun 2014 realisasi capaian 76,062 ton atau sebesar 105,73 %. Faktor utama dari penurunan produksi ini adalah banyaknya Tanaman Tua yang umur produksinya tidak optimal lagi selain itu tidak ada penambahan tanaman menghasilkan yang disebabkan oleh pekebun lebih cenderung kepada komoditi kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan atau pun adanya ketertarikan pada sektor lain seperti pertanian ataupun tambang. Upaya

untuk mempertahankan capaian produksi tersebut telah ditempuh berbagai program dan kegiatan seperti Pembinaan, Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok Sasaran serta penerapan sistem budidaya sesuai anjuran (GAP) seperti penggunaan klon-klon anjuran/bibit unggul. Untuk komoditi kakao Program nasional telah diluncurkan melalui program Gerakan Nasional (Gernas) peningkatan mutu dan produktivitas komoditi kakao melalui kegiatan intensifikasi rehabilitasi dan peremajaan pada sentra-sentra pengembangan komoditi kakao terutama di daerah / Kabupaten perbatasan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pun telah melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan aneka tanaman perkebunan lainnya yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman tersebut dan membantu pekebun dalam pengurangan biaya operasional. Selain itu, sering diadakan pendampingan terhadap kelompok tani untuk meningkatkan kesadaran pekebun terhadap aneka tanaman perkebunan lainnya.

Untuk target perluasan areal perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit. Pada Tahun 2009 luas Kelapa Sawit 530.554 Ha dan pada tahun 2014 perluasan naik menjadi 1.120.000 Ha atau mengalami kenaikan penambahan luas 589.446 Ha (111.10 %). Sehingga dapat dikatakan bahwa program pengembangan sejuta hektar kelapa sawit di Kalimantan Timur telah melebihi target RPJMD. Pengembangan komoditi Kelapa Sawit mengalami pertumbuhan pesat karena adanya dukungan pemerintah dan masyarakat luas, komitmen pemerintah dan investor perkebunan yang mempunyai keseriusan membangun perkebunan dan pemberian insentif perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun untuk pengembangan perkebunan aneka komoditi lainnya mengalami penurunan luasan. Pada Tahun 2009 luas aneka komoditi lainnya 181.612 Ha dan pada tahun 2014 perluasan turun menjadi 139,656 Ha atau mengalami penurunan luasan 41.956 Ha (-30,04 %). Faktor penyebab penurunan luas areal aneka komoditi lainnya adalah adanya okupasi lahan oleh aktivitas sektor lain di

luar pertanian dan terjadinya konversi tanaman ke komoditi kelapa sawit. Salah satu upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong perluasan areal aneka komoditi lainnya adalah menganggarkan kegiatan pembukaan lahan pola perkebunan inti rakyat dengan memberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan herbisida kepada pekebun.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2014, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 60,571,250,877,- dan realisasi hingga akhir 2014 adalah sebesar Rp. 53,225,253,295,- atau 87.87 %, sebagaimana tertera di tabel berikut ini :

Tabel 8. Rincian APBD dan Realisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)
2	3	4	5	6
Dinas Perkebunan Provinsi (Sekretariat)				
a. Belanja Tidak Langsung	11,663,575,409	100.00	11,210,318,369	96.11
b. Belanja Langsung	9,685,722,468	94.85	8,555,135,901	88.33
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,133,920,000	100.00	2,050,076,320	96.07
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1,947,392,843	100.00	1,826,481,461	93.79
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	280,780,000	100.00	271,882,600	96.83
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	438,939,625	100.00	365,548,850	83.28
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	990,700,000	100.00	877,991,450	88.62
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (Penyusunan Database potensi produksi pangan)	2,867,740,000	100.00	2,361,767,065	82.36
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)	1,026,250,000	100.00	801,388,155	78.09
TOTAL I	21,349,297,877	97.66	19,765,454,270	92.58
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				
a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2,335,534,500	84.58	1,958,542,015	83.86
TOTAL II	2,335,534,500	84.58	1,958,542,015	83.86
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
a. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	200,000,000	97.33	127,211,625	63.61
b. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	1,070,000,000	94.43	961,531,476	89.86
c. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	465,700,000	79.63	343,340,700	73.73

d. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	50,000,000	61.50	28,650,000	57.30
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				
a. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	253,950,000	91.73	179,380,050	70.64
Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan				
a. Revitalisasi dan Non Revitalisasi Serta Kemitraan Perkebunan	1,995,000,000	74.64	1,338,706,500	67.10
TOTAL	4,034,650,000	82.50	2,978,820,351	73.83
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				
a. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	1,315,175,000	100.00	1,143,375,941	86.94
b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	4,764,725,000	100.00	3,308,693,842	69.44
TOTAL	6,079,900,000	100.00	4,452,069,783	73.23
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				
a. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	11,518,466,000	95.06	10,490,954,711	91.08
b. Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Kopi	3,389,750,000	92.99	2,655,412,600	78.34
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				
a. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	315,075,000	83.97	222,161,800	70.51
TOTAL	15,223,291,000	94.37	13,368,529,111	87.82
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				
a. Belanja Tidak Langsung	1,214,160,000	100.00	1,159,080,000	95.46
b. Belanja Langsung	2,175,525,000	97.30	2,011,500,198	92.46
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	511,060,000	95.01	460,264,014	90.06
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	211,640,000	96.74	184,279,400	87.07
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300,500,000	100.00	280,790,000	93.44
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	196,800,000	86.59	170,400,000	86.59
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	955,525,000	100.00	915,766,784	95.84
TOTAL	3,389,685,000	98.27	3,170,580,198	93.54
UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan				
a. Belanja Tidak Langsung	1,046,920,000	100.00	959,820,000	91.68
b. Belanja Langsung	3,513,532,500	97.23	3,166,536,071	90.12
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547,295,000	100.00	488,538,748	89.26
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	866,412,500	100.00	798,099,923	92.12
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,000,000	92.11	81,635,900	85.93
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	211,200,000	100.00	211,200,000	100.00
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				

Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebunan	1,793,625,000	95.00	1,587,061,500	88.48
TOTAL	4,560,452,500	97.87	4,126,356,071	90.48
UPTD Teknologi Terapan Perkebunan				
a. Belanja Tidak Langsung	811,440,000	100.00	791,790,000	97.58
b. Belanja Langsung	2,787,000,000	100.00	2,613,111,496	93.76
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	566,960,000	100.00	543,463,815	95.86
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	160,200,000	100.00	158,216,397	98.76
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	100.00	22,665,000	90.66
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	211,200,000	100.00	198,000,000	93.75
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1,823,640,000	100.00	1,690,766,284	92.71
TOTAL	3,598,440,000	100.00	3,404,901,496	94.62
GRAND TOTAL	60,571,250,877	95.74	53,225,253,295	87.87

4. Perencanaan Pembangunan

Secara keseluruhan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakan aturan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan sasaran pembangunan meliputi :

1. Mewujudkan lahan perkebunan yang terdiri dari :
 - a. 1.000.000 Ha lahan Kelapa Sawit ;
 - b. 250.000 Ha yang meliputi komoditi Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Lada dan aneka tanaman perkebunan.
2. Meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha industri dan aparatur pembina, pengembangan pendidikan formal maupun melalui diklat-diklat jangka pendek dan menengah.
3. Menciptakan iklim investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hilir yang bahan bakunya telah tersedia seperti CPO dan lain-lain.
4. Pengembangan Perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomis tinggi

5. Peningkatan mutu dan kualitas serta pemasaran hasil produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pencapaian kinerja setiap instansi. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Tanah, Bangunan dan Gedung, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Pengairan, serta sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam Buku Inventaris Barang dan dalam neraca Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sarana dan prasarana termasuk dalam kategori aset tetap.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet pola PIR Swadaya di wilayah Kalimantan Timur tahun 2013 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan bibit di lapangan dan perlunya optimalisasi penangkar-penangkar bibit lokal.
2. Kemampuan teknis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
3. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
4. Para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) PIR Swadaya belum secara intensif melakukan sinkronisasi data dan memberikan pemahaman yang memadai

kepada petani/pekebun tentang perkebunan PIR Swadaya serta tahapan-tahapan pengembangannya sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program tersebut.

5. Dalam distribusi bantuan kepada petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Masih beredarnya bibit sawit palsu (tidak bersertifikat) di perkebunan rakyat yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani pekebun terhadap bibit sawit palsu

Upaya Penyelesaian Masalah

1. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar- penangkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit dan karet diharapkan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar-penangkar tersebut serta perlunya perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuaikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.
2. Petugas Perkebunan intensif melakukan pendampingan, pengawasan kepada petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada tingkat lapang dan kelompok tani di lapangan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan tehnik dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
3. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
4. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan tehnik PIR Swadaya.
5. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)

6. Mensosialisasikan kepada petani pekebun perbedaan antara bibit sawit asli dan bibit sawit palsu, sehingga petani pekebun memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat memilih benih sawit dengan benar dan tepat sasaran.